

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN
PERLENGKAPAN MODERNISASI ARSIP
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
JAKARTA SELATAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

M. TAUFIK AKBAR
NPM : 71200123137

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN
PERLENGKAPAN MODERNISASI ARSIP
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
JAKARTA SELATAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

M. TAUFIK AKBAR
NPM : 71200123137

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, Oktober 2022

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Mustamam, M.Ag)

(Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama Jakarta Selatan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019)”**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH, MS.CN selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Ibu Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Mustamam, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2022

Penulis

M. Taufik Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	14
1. Kerangka Teori	14
2. Landasan Konseptual	31
E. Asumsi.....	34
F. Keaslian Penelitian.....	35
G. Metode Penelitian.....	37
1. Sifat dan Jenis Penelitian	37
2. Metode Pendekaan.....	39
3. Alat Pengumpulan Data.....	40
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	40
5. Analisis Data.....	41
BAB II : PENGATURAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	43
A. Tindak Pidana Korupsi	43
B. Unsur Memperkaya dalam Tindak Pidana Korupsi	53
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa	71

BAB III : BENTUK PRAKTEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN PERLENGKAPAN MODERNISASI ARSIP SMP JAKARTA SELATAN	79
A. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	79
B. Pemberian Gratifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	94
C. Penyimpangan dari Prosedur dan Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Telah Ditetapkan	102
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3676 K/PID.SUS/2019.....	136
A. Kronologis Kasus	135
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	137
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	138
D. Putusan	139
E. Analisa Kasus.....	141
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amir, Chaerul, *Kejaksanaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis)*, Deleader, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 2014.
- Baringbing, RE, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2016.
- BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012.
- Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017.
- Gie, Kwik Kian, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2017.

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ; *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- ; *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebini, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Indrawati, Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015.
- Kartikani, Pindo, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi*, Mandar Madju, Bandung, 2017.
- Koewadji, Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Lapananda, Yusran, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2015.
- Maas, Marwan, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

- Makawimbang, Hernol Ferry, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan Dana Desa*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2016.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- Matondang, Herman, *Gratifikasi dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan Tugas dan Kewajiban Aparatur Negara*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2011.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Nelson, Febby Mutiara, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persa, Depok, 2020.
- Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Poerwadarmina, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Prins, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prodjokoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015.
- , *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, 2014.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2018.
- Saibani. A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta, 2014.
- Salam, Moch Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,:Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2016
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soemitro, Roni Hantijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- ; *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2019.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Yunara. Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.

Tresna, R. *Komentar HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

C. Internet

Muhammad Jasin, et.al., Memahami untuk Melayani Melaksanakan e-Announcement dan eProcurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), diakses tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

www.hukumonline.com, “Benarkah Aturan Gratifikasi Sangat Lemah dan Sulit Dilaksanakan, diakses tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 10.⁰⁰Wib.

www.hukumonline.com, “Agar Dunia Usaha Tidak Terhambat, Aturan Gratifikasi Perlu Lebih Rinci”, diakses tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 10.⁰⁰Wib.

D. Jurnal

Adnan, Hasyim, “Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

-----, “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa”, *Jurnal Al’Adl*, Volume XI Nomor 2, Juli 2019.

Budiyono, Bayu Sukmawan, “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol.I No.2 Tahun 2019.

Haidin, Sahrul, “Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu)”, *Jurnal IUS*, Vol V Nomor 1 April 2017.

Hasibuan, Albert dalam Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012.

Hanavia, Evie, ”Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2018.

- Husna, Saifatul, "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Kurniawan, Muhammad Rezza, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.
- Mongilala, Chrisye, "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6/Juni/2016.
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII Agustus, 2019.
- Rahman, Fathur, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)," *Jurnal Integritas* Vol. 4 Nomor 1, Malang, 2018.
- Sagita, Reflay Ade, "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.
- Sumolang, Kristendo, "Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI/No. 1 Jan-Feb 2017.
- Sulumin, Hasman Husin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala", *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015.
- Winarni, Endah Dwi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Yulianah, Yuyun, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.I No. 02Edisi Juli-Desember 2015.